

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Bauhr, Monica dan Nagmeh Nasiritousi, *Why Pay Bribes? Collective Action and Anti Corruption Efforts*, University of Gothenburg, Sweden.
- Chazawi, Adami, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publising, Malang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djaja, Ermasjah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S., Salim, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasibuan, Albert, 1997, *Titik Pandang Orde Baru*, Pustaka Sibar Harapan, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Hidayat, Syarif, 2005, *Too Much Too Soon*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Imawan, Riswanda, "Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance", dalam Syamsudin Haris (Editor), 2001, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, P2p-LIPI, Jakarta.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni, Bandung.
- Kaloh, J., 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah; Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Klitgaard, Robert, 2001, *Membasmi Korupsi*, diterjemahkan oleh Hermoyo, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kuncoro, Mudjarad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Kurniawan, Luthfi J., et all, 2003, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, In-Trans Malang, Malang.
- Maddick, Henry, 1966, *Democracy, Decentralization on Development*, Reprinted London, Asia Publishing House, hlm. 23. Diterjemahkan bebas dengan judul *Desentralisasi dalam Praktek*, 2004, Cetakan I, Pustaka Kencdi, Yogyakarta.
- Mahfud, Moh., 1999, *Pergulatan Hukum dan Politik di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah- Cetakan ke III*, PSH FH UII, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian KUalitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muslimin, Amrah, 1978, *Aspek-aspek Hukum Otomoni Daerah*, Alumni, Bandung.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nugraha, Safri, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang, 1983, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.

- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Santoso, Agus, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syaukani, *et all*, 2012, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara Manusia Indonesia dan Perilaku Politik)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Situmorang, Victor, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedarso, B., 1969, *Korupsi di Indonesia*, Bhratara, Jakarta.
- Soedjito, Irawan, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soehino, 1996, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ke-tiga*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunarno, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supandi, 2014, Kewenangan Diskresi Pemerintah Dalam Sistem Hukum Indonesia dalam Subur MS (Editor), *Peradilan Administrasi Kontenporer*, Genta Press, Yogyakarta.
- Supeno, Hadi, 2009, *Korupsi di Daerah – Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan*, Total Media, Yogyakarta.
- Surachmin, Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Suteda, Adrian, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Syaukani, *et all*, 2012, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, H.A.W., 2007, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wiyono, R., 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor)
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 taun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620)
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Maret 2018.

MAKALAH DAN ARTIKEL

Andras Sajo, *‘Introduction, Clientelism and Exortion: Corruption in Transition’ in Kotkin, S. and A. Sajo (eds), Political Corruption in Transition: A Skeptic’s Handbook*, Budapest: Central Europe University Press, Budapest

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, 2015, “Monitoring dan Evaluasi Atas Hasil Koordinasi dan Superfisi Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Bengkulu, Lampung, dan Banten”, *Makalah*, Jakarta, 22 April 2015.

Maria Gonzales de Aziz, *Reducing Corruption at the local level*, World Bank Institute.

Ryaas Rasyid, “Otonomi Daerah dan Persatuan Nasional”, *Jurnal Paskal Edisi I Tahun 2001*.

Riswanda Imawan, “Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance”, dalam Syamsudin Haris (Editor), 2001, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, P2p-LIPI, Jakarta.

Saldi Isra, 2008, Korupsi dan Desentralisasi Korupsi, Makalah disampaikan dalam Diskusi Publik “*Desentralisasi Korupsi; Carut marut Otonomi Daerah?*”, diselenggarakan oleh Pusat kajian Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan DPD RI, Yogyakarta 26 November 2008.

Tejoyuwono Notohadiningrat, 2002, “Pengelolaan Lingkungan Untuk Kelanjutan kegunaan Sumber Daya Alam”, Makalah *Seminar Nasional Arah dan Kebijakan Pembangunan yang Berkelanjutan dalam Upaya Optimalisasi Sumber Daya untuk Pembangunan*, Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta.

World Bank. Youth for Good Governance, distance learning program (Module), Washington: World Bank.

Zaqui Rahman, “Perubahan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara: Upaya Untuk Menata Kembali Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding Edisi I Tahun 2016*.

INTERNET

- Anonim, “Jelang Pilkada Korupsi Sumber Daya Alam di nilai rawan terjadi Korupsi”, <https://kumparan.com/@kumparannews/jelang-pilkada-korupsi-sumber-daya-alam-dinilai-rawan-terjadi>, di akses pada tanggal 10 Agustus 2018.
- Anonim, “Korupsi Sektor Pertambangan”, <http://www.beritasatu.com/tajuk/5827-korupsi-sektor-pertambangan.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018.
- BPKP, “Laporan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tentang Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi”, <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2018
- Detik, “KPK Waspadai Kepala Daerah miliki Konsesi Tambang”, <https://news.detik.com/berita/d-4047652/kpk-waspadai-kepala-daerah-miliki-konsesi-tambang>, di akses pada tanggal 8 Juli 2018.
- Detik.com, “ICW Nilai PerdaTerkait Sumber Daya Alam Beri Celah Korupsi Kepala Daerah”, <http://news.detik.com/berita/2783572/icw-nilai-perda-terkait-sumber-daya-alam-beri-celah-korupsi-kepala-daerah>, diakses pada tanggal 8 Desember 2015.
- KBBI, “tambang”, <http://kbbi.web.id/tambang>, diakses pada tanggal 10 Desember 2015.
- Kementerian Dalam Negeri, “Mendagri: Sejak 2004 Penyuapan jadi modus Korupsi terbanyak”, <https://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/25404-Mendagri-Sejak-2004-Penyuapan-Jadi-Modus-Korupsi-Tebanyak>, diakses pada tanggal 7 Desember 2018.
- KPK, “Laporan Tahunan KPK Tahun 2017”, www.kpk.go.id, diakses pada tanggal 23 Maret 2018.
- Herdiansyah Hamzah, “Korupsi Sumber Daya Alam”, <https://www.researchgate.net/publication/321446672>, diakses pada tanggal 17 Desember 2017.
- Migas Review, “Perizinan Tambang Sarat Potensi Korupsi”, <http://www.migasreview.com/post/1472202609/perizinan-tambang-sarat-potensi-korupsi.html>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2018.

- Republika, ‘ICW Catat 30 Kepala Daerah Tersangka Korupsi di 2017’, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/20/p4eun9354-icw-catat-30-kepala-daerah-tersangka-korupsi-di-2017>, diakses pada tanggal 7 Desember 2018.
- Tama S Langkun, 2018, Korupsi Sumber Daya Alam, <http://www.migasreview.com/upload/7D1419829426.pdf>, di akses pada tanggal 27 Mei 2018.
- Transparency Intenasional Indonesia, *Penilaian Resiko Korupsi dalam Pemberian Izini Usaha Pertambangan di Indonesia*, 2017. Di akses melalui http://transparency.org.au/tia/wp-content/uploads/2017/12/Indonesia_M4SD_Bahasa.pdf pada tanggal 4 Agustus 2018
- Tribun Nasional, ‘Sejak Otonomi Daerah 70 Persen Kepala daerah Terjerat Korupsi’, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/25/sejak-otonomi-daerah-70-persen-kepala-dan-wakil-kepala-daerah-terjerat-korupsi>, diakses pada tanggal 12 November 2015.
- VOA, ‘ICW: Otonomi daerah picu korupsi Kepala Daerah,’ <https://www.voaindonesia.com/a/icw-otonomi-daerah-picu-korupsi-kepaladaerah/1690178.html>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2018
- VOA, ‘Indeks Persepsi Korupsi RI Turun’, <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750.html>, diakses pada tanggal 7 Desember 2018.
- Wahyudi, ‘Survei Persepsi Korupsi’, www.ti.or.id/index.php/publication/2015/09/15/survei-persepsi-korupsi-2015, diakses pada tanggal 18 Maret 2016.
- www.jatam.org , diakses pada tanggal 4 Juni 2018